

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pengelolaan Barang Milik Negara merupakan elemen krusial dalam administrasi keuangan negara yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset secara berkelanjutan (Vera, 2024). Secara etimologis, istilah 'pengelolaan' berakar dari kata 'kelola' yang bermakna pengurusan, perawatan, pengawasan, dan pengaturan. Dalam konteks organisasi, pengelolaan sering kali dipadankan dengan istilah manajemen, yang merujuk pada tata kelola sumber daya secara sistematis.

Manajemen Barang Milik Negara yang sangat baik sangat penting untuk mempertahankan akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas penggunaan aset negara. Dalam konteks pendidikan universitas, manajemen produk adalah aspek penting dari mendukung kegiatan akademik, manajemen, dan layanan yang ditujukan untuk akademisi. Implementasi manajemen pemerintahan yang efektif menjadi prasyarat utama agar pelimpahan kewenangan kepada daerah dapat terlaksana secara optimal. Hal ini diperlukan guna menjamin bahwa penyelenggaraan urusan publik tidak hanya mencapai hasil maksimal, tetapi juga memenuhi standar akuntabilitas yang tinggi terhadap masyarakat (Hartanto, 2019)

Menurut Anugrah et al. (2022), inventarisasi merupakan kegiatan krusial dalam memperoleh informasi akurat mengenai keberadaan dan jumlah barang inventaris milik negara. Aset yang diadakan melalui mekanisme pembelian tersebut harus ditata dan dikelola secara administratif berlandaskan pada ketentuan serta prosedur teknis yang telah ditetapkan oleh instansi terkait demi tercapainya akuntabilitas data. Pengelolaan Barang merupakan suatu rangkaian kegiatan dan tindakan yang dilakukan untuk mengatur dan mengendalikan barang, baik berupa aset maupun

barang-barang lain, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan atau pemindahtanganan. Barang yang dipakai guna mendukung kegiatan institusi pemerintahan atau lembaga daerah dapat diartikan sebagai Barang Milik Negara yaitu barang yang didapat dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dikelola oleh instansi pemerintah, yang juga Badan Usaha Milik Negara dan lembaga pendidikan, seperti universitas.

Kerangka regulasi pengelolaan aset negara di Indonesia dirancang secara komprehensif untuk memastikan setiap aset dikelola secara tertib dan akuntabel. Pedoman mekanisme ini pada awalnya ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Namun, seiring dengan tuntutan dinamika pengelolaan aset yang lebih adaptif, peraturan tersebut kemudian diperbarui dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Regulasi ini menetapkan kerangka umum mengenai tata kelola Barang Milik Negara, yang mencakup aspek pembagian wewenang, ruang lingkup tanggung jawab, serta prosedur teknis pengelolaannya. Dalam konteks institusi pendidikan tinggi, status kepemilikan aset—baik sebagai Barang Milik Negara maupun Barang Milik Daerah—sangat bergantung pada klasifikasi universitas serta sumber pendanaan yang digunakan.

Perguruan tinggi negeri yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki klasifikasi aset berupa Barang Milik Negara (BMN), yang mencakup tanah, bangunan, hingga infrastruktur pendukung lainnya. Sebagai contoh, Universitas Negeri Padang yang kini berstatus Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), telah mengimplementasikan manajemen aset secara strategis guna mendorong optimalisasi kekayaan lembaga. Langkah ini selaras dengan tujuan transformasi kelembagaan yang berfokus pada penciptaan sumber pendapatan mandiri (income generating) melalui pendayagunaan aset secara

maksimal (Rahmah & Nurpita, 2004). Seluruh proses tata kelola BMN tersebut wajib dipastikan koherensinya dengan PP Nomor 27 Tahun 2014 dan PP Nomor 28 Tahun 2020 demi mendukung efektivitas fungsi lembaga pendidikan. UPT. Perpustakaan sebagai unit implementasi teknologi yang berfungsi untuk memberikan informasi dan referensi ilmiah, membutuhkan dukungan yang memadai untuk fasilitas dan infrastruktur, termasuk transparansi dan manajemen aset yang layak.

Universitas Negeri Padang sebagai lembaga universitas negeri, dan yang mampu tugas untuk manajemen Barang Milik Negara, lingkungan UPT. Perpustakaan yang optimal. Namun, pada kenyataannya, manajemen produk sering tidak tersedia. Ini dapat mempengaruhi kualitas layanan yang buruk dan kemungkinan pemutusan saat melaporkan aset. Barang Milik Negara pandangan peran yang mendukung kelancaran operasi Institut dan kebutuhan untuk manajemen regulasi hukum harus dianalisis. Penulisan Tugas Akhir ini, termasuk proses pengelolaan properti negara bagian atau regional di UPT. Perpustakaan Universitas Negeri Padang, pembatasan yang bertentangan, dan usaha peningkatam layanan aplikasi. Aset perlu ditingkatkan dapat meningkatkan upaya untuk meningkatkan manajemen perawatan.

Penggunaan barang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dan mempermudah suatu kegiatan dalam mencapai suatu tujuan, sehingga penggunaan barang harus dikelola secara baik dan benar. Salah satu lembaga yang termasuk dalam properti negara bagian/lokal adalah Perpustakaan Universitas Negeri Padang, yang berfungsi sebagai pusat informasi dan pembelajaran untuk komunitas akademik dan masyarakat umum. UPT. Perpustakaan Universitas Negeri Padang bertanggung jawab untuk mengelola buku negara bagian atau regional, majalah, dan sumber daya informasi lainnya. Efektivitas pengelolaan aset tetap dalam menghasilkan informasi

laporan keuangan yang akurat sangat bergantung pada kelengkapan dokumen sumber. Dokumen-dokumen tersebut menjadi landasan fundamental dalam pelaksanaan setiap tahapan siklus tata kelola aset guna menjamin validitas dan akuntabilitas data yang tersaji (Lahada, 2021).

Manajemen yang tepat dari negara bagian/real estat regional sangat penting karena dapat mempengaruhi kualitas layanan perpustakaan. Koleksi yang lengkap dan terawat baik memungkinkan perpustakaan guna memberi formasi bagi pengguna, mendukung proses belajar mengajar, dan berkontribusi pada pengembangan sains dan teknologi. Properti negara bagian atau lokal dapat mempengaruhi kualitas layanan perpustakaan. Berlandaskan pada argumentasi yang telah dipaparkan di atas, penulis termotivasi untuk melakukan kajian lebih mendalam yang kemudian dituangkan dalam laporan Tugas Akhir dengan judul: **“Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Negeri Padang”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Penyusunan rumusan masalah dalam Tugas Akhir ini berfungsi sebagai instrumen pengarah agar kajian tetap konsisten dan relevan dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, fokus permasalahan yang akan dikaji dalam laporan Tugas Akhir ini adalah:

1. Apa saja jenis Barang Milik Negara yang dimiliki UPT. Perpustakaan Universitas Negeri Padang?
2. Bagaimana pengelolaan Barang Milik Negara pada Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMAS) UPT. Perpustakaan Universitas Negeri Padang?



### **1.3 Tujuan Penulisan Tugas Akhir**

Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk mengkaji secara mendalam sistem pengelolaan serta mekanisme pengadaan Barang Milik Negara di lingkungan UPT Perpustakaan Universitas Negeri Padang. Selain itu, penulisan ini dimaksudkan agar penulis memperoleh pengalaman praktis serta wawasan komprehensif mengenai tata kelola aset di lapangan.

### **1.4 Manfaat Penulisan Tugas Akhir**

Adapun manfaat yang diharapkan dapat dihasilkan dari penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

#### **1.4.1 Bagi Mahasiswa**

Untuk memberikan pengalaman yang berharga, mendapatkan pengalaman praktis dalam lingkungan Perpustakaan yang dapat menjadi bekal untuk karir di bidang Perpustakaan dan informasi serta peneliti dapat di beri nilai oleh pihak kampus setelah melaksanakan magang.

#### **1.4.2 Bagi Instansi**

Kontribusi positif kepada pengelolaan Barang Milik Negara di Perpustakaan Universitas Negeri Padang.

### **1.5 Metode Pengumpulan Data**

#### **1.5.1 Studi Perpustakaan**

Teknik pengumpulan data dalam penyusunan Tugas Akhir ini menggunakan metode studi kepustakaan. Penulis melakukan pengumpulan, penelaahan, serta pengkajian secara mendalam terhadap berbagai literatur dan buku referensi yang memiliki relevansi kuat dengan topik pengelolaan aset serta permasalahan yang menjadi fokus bahasan.

### **1.5.2 Studi Lapangan**

Metode pengumpulan data lapangan dilakukan melalui program magang di UPT Perpustakaan Universitas Negeri Padang. Penulis melakukan peninjauan langsung secara mendalam untuk memperoleh data primer yang diperlukan, sekaligus mempelajari serta menganalisis informasi yang relevan dengan objek penelitian guna memastikan keakuratan hasil bahasan.

### **1.5.3 Pencarian Data Melalui Internet**

Pengumpulan data secara daring dilakukan dengan menelusuri berbagai bahan referensi pendukung melalui situs-situs web tepercaya yang relevan dengan topik penelitian. Melalui studi digital ini, penulis memperoleh berbagai informasi tambahan dan data sekunder yang diperlukan untuk melengkapi serta memperkuat analisis dalam laporan ini.

## **1.6 Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif ini diawali dengan mengidentifikasi proses pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) pada UPT Perpustakaan Universitas Negeri Padang. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan, dipelajari, dan diolah secara mendalam. Selanjutnya, hasil temuan di lapangan dibandingkan dengan landasan teoretis serta regulasi yang berlaku, khususnya Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, guna menarik kesimpulan penelitian yang komprehensif.

## **1.7 Batasan Masalah**

Penulisan Tugas Akhir ini diambil dari data Sistem Informasi Manajemen Aset Strategis (SIMAS). Penulisan Tugas Akhir ini hanya membahas (Transaksi/Perolehan) berfokus hanya pada perolehan pada bagian pembelian.

## **1.8 Sistematika Laporan**

Sistematika penulisan laporan ini terbagi atas 5 (lima) bab yang saling terkait satu sama lain sebagai satu kesatuan kerangka analisis. Rincian dari setiap bab dan sub-bab yang menjadi landasan pemahaman masalah adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam Bab I, penulis meletakkan kerangka dasar penelitian yang mencakup urgensi permasalahan dalam latar belakang dan merumuskannya ke dalam rumusan masalah. Bab ini juga menjelaskan target yang ingin dicapai melalui tujuan pengamatan, pendekatan metodologi yang diterapkan, serta urutan pembahasan dalam sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab II memaparkan landasan teoretis mengenai definisi serta ruang lingkup Barang Milik Negara (BMN). Selain itu, bagian ini juga menguraikan mekanisme pengelolaan aset secara periodik dengan memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen Aset Strategis (SIMAS) sebagai instrumen utama dalam penatausahaan aset yang akuntabel.

### **BAB III GAMBARAN UMUM INSTITUSI**

Bab III menyajikan gambaran umum mengenai UPT Perpustakaan Universitas Negeri Padang yang mencakup latar belakang sejarah berdirinya instansi. Selain itu, dipaparkan pula profil operasional, struktur organisasi, serta berbagai jenis layanan yang disediakan bagi pemustaka sebagai bagian dari komitmen lembaga dalam mendukung kegiatan akademik.

### **BAB IV PEMBAHASAN**

Bab III merupakan inti dari laporan Tugas Akhir yang menyajikan hasil penelitian dan analisis mendalam mengenai mekanisme pengelolaan Barang Milik

Negara pada UPT Perpustakaan Universitas Negeri Padang. Di dalamnya diuraikan secara detail proses teknis serta implementasi kebijakan tata kelola aset yang berjalan di instansi tersebut.

## **BAB V KESIMPULAN**

Bab terakhir ini menyajikan kesimpulan yang ditarik dari hasil analisis serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu, penulis juga merumuskan saran-saran konstruktif yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak manajemen dalam upaya mengoptimalkan tata kelola Barang Milik Negara pada UPT Perpustakaan Universitas Negeri Padang.

